

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang masih banyak dijumpai dalam berbagai pemberitaan di media massa hingga saat ini. Tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain. Kemudian pada akhirnya, orang lainlah yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual, maka Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual tersebut diantaranya yaitu perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.¹ Terdapat berbagai definisi mengenai *Gender Based Violence*. *UN Comissioner for Refugee* mendefinisikan GBV sebagai bentuk kekerasan yang ditargetkan kepada seseorang atau sekelompok orang karena gender mereka (*“Gender based violence refers to violence that targets a person or a group of persons because of gender”*). Sedangkan komite

¹ Friska Widianingrum *“Pelecehan Seksual Terhadap Anak”*, UMY Repository, 2017, hlm 38, diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15983/BAB%20III.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 16.40 WIB.

penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengartikan dengan lebih luas, yaitu termasuk kepada tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, seksual, penderitaan, ancaman, tindakan dan paksaan serta perampasan kebebasan lainnya berdasarkan gender mereka. Kemudian UNIFEM (*United Nations Development Found for Woman*) memasukkan konteks baru dalam pendefinisian GBV, yaitu adanya unsur hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.²

Dalam catatan Komnas Perempuan selama 12 tahun mulai dari tahun 2001 hingga 2012, setiap harinya terdapat korban kekerasan seksual sedikitnya sebanyak 35 perempuan. Kemudian tahun 2012 ada 3.937 kasus kekerasan seksual. Sebanyak 2.521 kasus kekerasan seksual tahun 2012 terjadi di ranah publik atau komunitas. Mayoritas bentuknya berupa perkosaan dan pencabulan sebanyak 1620 kasus. Sedangkan pada tahun berikutnya bertambah menjadi 5.629 kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, dapat artikan bahwa pada tahun 2013 terdapat 2 perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam waktu 3 jam. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun untuk remaja perempuan dan 25-40 tahun untuk perempuan dewasa. Dalam data Komnas HAM tahun 2015, terdapat 6.499 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Angka ini mengalami peningkatan dari angka tahun sebelumnya. Ditahun 2014, yang melaporkan sebanyak 4.457. Kasus kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diketahui maupun diungkap dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Hal ini dikarenakan kasus ini selalu dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan akan dipandang rendah

² Rahmi Yulia, "*Gender Based Violence in International Relations*", Jurnal Universitas Riau, 2012 hlm 1-2, diakses dari http://www.academia.edu/Gender_Based_Violence_in_International_Relations, pada tanggal 17 September 2019 pukul 18.30 WIB.

dan akan menjadi aib baginya apabila mengalami kekerasan seksual seperti kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan selama ini perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Selain itu, perempuan yang menjadi korban bahkan juga sering disalahkan karena bentuk fisik maupun gaya berpakaian yang menjadikan penyebab terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan seksual tidak selalu memandang fisik, usia, bahkan gaya berpakaian dari seseorang. Maka, inilah yang membuat korban perempuan seringkali bungkam.³

Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi setiap orang untuk dapat lebih memperhatikan kasus tersebut. Hubungan kekuasaan yang tidak setara, baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara dapat menjadikan perempuan lebih rentan mengalami kekerasan.

Seorang aktivis dan pemimpin “Pita Putih” bernama Michael Kaufman, mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan tiga faktor, yaitu karena adanya budaya patriarki, hak-hak istimewa (*privilege*), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*). Kekuasaan patriarki menjadi faktor pendorong dan pemicu utama dibalik kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dalam budaya patriarki terjadi subordinasi dan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu, adanya hak-hak istimewa yang dimiliki laki-lakipun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada

³ Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual”, (Jakarta: Thoeng Sabrina Universitas Bina Nusantara, 2017), hlm 4, diakses dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, pada 18 Februari 2019 tanggal pukul 21.00 WIB.

perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya maupun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut. Sebab, sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan. Dalam ranah publik, sikap permisif (memperbolehkan) merupakan tindakan apapun yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa dalam masyarakat. Sebagai contoh, kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami berupa pemukulan kepada istri. Kejadian ini masing dianggap sebagai persoalan yang privat bagi segolongan masyarakat tertentu, dan dianggap lazim apabila di dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya.⁴ Maka dari itu, hal ini menjadi sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui gender dimana peran ataupun tanggung jawab serta kekuasaan (power) dapat disetarakan. Sehingga di sini perempuan tidak dianggap lemah yang kemudian mudah sekali menjadi korban dari kekerasan seksual.

Salah satu lembaga yang memiliki konsen dalam isu ini adalah Rutger WPF. Organisasi internasional ini telah bergerak sejak tahun 1997. Kemudian pada tahun 2010 ketika Rutgers WPF bergabung dengan Rutgers Nisso dan mulai beroperasi di Indonesia, nama organisasi ini berganti menjadi Rutgers WPF Indonesia. Awal penggabungan ini terbentuk dari kedua organisasi yang memiliki cita-cita yang sama yaitu meningkatkan kualitas

⁴ Utami Zafirah Noviani P, Rifda Arifah K, Cecep, Sahadi Humaedi, *“Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif”*, Jurnal Universitas Padjadjaran , 2018 , Volume 5, No.1, hlm 50-51, diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/16035>, pada tanggal 16 September 2019 pukul 19.50 WIB.

hidup manusia dan menghapuskan kekerasan. Untuk memastikan organisasi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dunia termasuk Indonesia, maka Rutgers WPF Indonesia bekerja mulai dari memberikan pendidikan seksualitas komprehensif, menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai penyediaan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, hingga menciptakan toleransi dalam keberagaman.

Rutgers WPF tidak hanya beroperasi di Indonesia. Namun, juga beroperasi di beberapa negara Asia seperti Pakistan, Afrika, Eropa dan Amerika Latin. Panduan kerja dalam Rutgers WPF mengacu pada *Cairo Programme of Action*. Panduan ini merupakan hasil dari konferensi internasional tentang populasi dan pembangunan di Kairo-Mesir tahun 1994. Hasil dalam konferensi tersebut yakni berkaitan dengan pemberdayaan remaja, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya agar menjadi subjek pembangunan yang berdaulat penuh atas tubuhnya sendiri.⁵

Organisasi ini memiliki visi yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif (mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas). Di Indonesia, Rutgers WPF berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan terpenuhinya hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang setara dan non diskriminatif. Terdapat empat prinsip yang mendasari visi ini, diantaranya yaitu adanya pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, mendukung upaya untuk membangun nilai-nilai non kekerasan, adanya sikap positif dan terbuka terhadap seksualitas dan keberagaman, serta semua kegiatan didasarkan pada data di lapangan,

⁵ Rutgers WPF, diakses dari <https://www.rutgers.id/siapa-kami/tentang-kami>, pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.

kepekaan pada konteks budaya, kesetaraan gender, ras atau suku, usia, agama, dan keterlibatan aktif kelompok yang telah ditargetkan.⁶

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat adalah “Bagaimana Strategi Rutgers WPF dalam menangani *Sexual and Gender based Violence (SGBV)* terhadap perempuan di Indonesia”

C. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Konsep Feminisme dan Teori Advokasi.

1. Konsep Feminisme

Feminisme dalam bahasa latin yaitu *femina* yang berarti perempuan. Istilah ini tertuju pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta sebuah gerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan yang mulai digunakan pada tahun 1890-an.⁷ Feminisme berusaha untuk menyadarkan adanya kedudukan yang rendah pada perempuan di dalam masyarakat. Sehingga terdapat keinginan untuk memperbaiki dengan mengubah keadaan tersebut.

Secara garis besar, terdapat 3 aliran feminisme.

a. Feminisme Liberal.

Feminisme liberal lahir pertama kali pada abad ke-18. Tokoh dalam feminisme ini diantaranya yaitu Mary wollstonecrat (1759-1799) dengan tulisannya *A Vindication of the Right of Women* , kemudian pada abad ke-19 yaitu John Stuart Mill dengan bukunya *Subjection of Women* dan Harriet Taylor Mills daengan bukunya *Enfranchisemen of*

⁶ *Ibid*

⁷ Asmaeny Azis, “*Feminisme Profetik*” (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm 78.

Women, hingga pada abad 20 Betty Friedan dalam *The Feminis Mistique* dan *The second Stage*. Para feminis liberal mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal dimana pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan serta rasionalitas yang sama, dimana ada dua aspek dalam rasionalitas yaitu moralitas berkenaan dengan *decision maker* dan prudensial atau pemenuhan terhadap kebutuhan sendiri.⁸

Para penganut feminisme liberal berpendapat bahwa seperti halnya laki-laki, perempuan mampu untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan moralitas mereka. Dalam hal ini berarti perempuan adalah makhluk yang rasional. Seperti laki-laki yang juga mempunyai hak untuk ikut serta dalam kehidupan politik, perempuan dapat memberikan sumbangan pada perdebatan tentang isu-isu politik, sosial, dan moral.⁹ Ciri utama dari gerakan feminisme adalah adanya pelibatan perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*). Semua aksi dan pergerakan dalam aliran ini pada akhirnya memberikan ruang kosong dan kebebasan bagi keterlibatan kelompok perempuan dalam segala aspek kehidupan.

b. Feminisme Sosialis

Dalam Feminis sosialis lebih menekankan aspek gender dan ekonomis dalam kedudukan atas kaum perempuan. Dalam pandangan Marx dan “kelas sosial”, perempuan dilihat sebagai penghuni kelas ekonomi. Artinya, perempuan sebenarnya telah menampilkan pelayanan berharga bagi

⁸ T.O. Ihromi, “*Kajian Wanita Dalam Pembangunan*”, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm 86.

⁹ Yohanes Sulaiman, “*Menyoal Teori dalam Ilmu Hubungan Internasional*”, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm 327.

kapitalisme. Dalam hal ini perempuan sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas pekerjaan domestiknya. Dalam sistem kapitalis, perempuan digambarkan pada posisi rendah dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik, serta ditambah adanya analisis patriarki yang memusatkan segala aspek pada laki-laki.¹⁰ Untuk itu, munculah tuntutan feminis sosialis untuk tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam pemberian upah dan kesempatan bagi perempuan untuk dapat cuti kerja sesuai dengan kebutuhan, seperti cuti hamil dan masa menyusui anak. Jadi fokus dalam feminisme sosialis ini adalah kapitalisme dan patriarki dimana perempuan ditempatkan pada posisi tidak istimewa.

c. Feminisme Postmodern

Walt (1998) menyatakan posmodernisme adalah salah satu tradisi dalam Hubungan Internasional yang paling berpengaruh dari akhir 1990-an sampai awal 2000-an.¹¹ Posmodernisme mempunyai arti ‘*after modernity*’ atau pasca modernitas. Oleh sebab itu, posmodernisme erat kaitannya dengan modernitas. Beberapa tokoh dari posmodernisme diantaranya adalah Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Jean-Francois Lyotard. Terdapat empat poin penting yang ditekankan dalam pemikiran kaum posmodernis.¹² Pertama, keterkaitan antara kekuatan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) dalam studi Hubungan Internasional. Pemikiran dari Michel Foucault

¹⁰ Alfian Rokhmansyah, “*Pengantar Gender & Feminisme*”, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm 53.

¹¹ Cynthia Weber, “*International Relations Theory, A Critical Introduction*”, (Routledge 2005), Chapter 4, hlm 59-80.

¹² Richard Devetak, “*Postmodernism. in Theories of International Relations*”, (Palgrave, 2001), hlm181-208.

menjadi salah satu pemikiran yang paling berpengaruh dalam posmodernisme ini. Foucault mengemukakan bahwa *knowledge* (ilmu pengetahuan) dan *power* saling mempengaruhi dan keduanya saling menguatkan satu sama lain.¹³ Sejalan dengan Foucault, Jackson dan Sorensen (2005) juga beranggapan bahwa pengetahuan dapat meluas dan meningkat, dengan demikian kemampuan manusia dalam hal penguasaan juga ikut meningkat. Tidak hanya atas dunia alam namun juga dunia sosial termasuk sistem internasional. Konsep yang menjadi pemikiran historis dalam membahas tentang signifikansi dalam hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan ialah konsep genealogi. Konsep ini memberikan benang merah antara klaim terhadap ilmu pengetahuan dengan klaim terhadap *power* dan otoritas. Dengan kata lain, sebuah *power* dapat membentuk *knowledge*. Kedua, adanya pendekatan tekstual dalam posmodernisme. Derrida mengatakan bahwa '*there is nothing outside the text*' dimana kaum posmodernis ini tak hanya memandang teks sebagai tulisan belaka.¹⁴ Ini merupakan kumpulan fenomena yang dapat dipahami dan kaji lebih lanjut sehingga hal tersebut dapat ditata ulang. Oleh karenanya dibutuhkan suatu *double reading*. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana selalu ada lebih dari satu pembacaan dari teks apapun. Ketiga, pemaknaan negara dan entitasnya dalam feminisme postmodern dimana negara, kedaulatan, dan kekerasan adalah pembahasan yang tak pernah berhenti dibahas dalam studi

¹³ *Ibid*

¹⁴ Chris Brown, "*Critical Theory and Postmodernism in International Relations*, in: A.J.R. Groom & Margot Light (eds.), *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*", (Pinter, 1994), hlm 56-68.

Hubungan Internasional. Keempat, upaya posmodernisme untuk kembali memikirkan tentang pemahaman masyarakat terkait politik. Sebelum dikonstruksikan oleh postmodernisme, implikasi utama dari keadaan dunia salah satunya adalah, gambaran politik masyarakat yang semakin miskin. Maka, ini seolah menjadikan pemahaman tentang dinamika politik dunia dibatasi.

Melihat beberapa aliran yang ada, Rutger WPF merupakan sebuah gerakan sosial yang mengarah pada aliran femisme liberal dan sosialis. Hal ini dikarenakan dalam berjuang menangani SGBV terhadap perempuan di Indonesia, NGO ini berpegang atas dasar adanya kebebasan hak setiap individu. Seperti hak untuk mengembangkan kapasitas intelektual & moralitas, dan ikut serta dalam pembangunan dan kehidupan politik. Dalam memenuhi hak tersebut, Rutgers WPF menjalankan beberapa program pemberdayaan perempuan baik remaja maupun dewasa, kemudian meningkatkan kemampuan guru-guru pendidik, sebagai penyedia layanan, dan pemberian sosialisasi untuk para orang tua dalam menanggulangi kekerasan. Sebagai contoh dengan memberikan pendidikan tentang seksualitas yang komprehensif bagi anak dan remaja dengan melibatkan guru dan orang tua. Seperti pengajaran modul SETARA dan diskusi komunitas reguler untuk laki-laki dan perempuan baik remaja maupun dewasa dalam program *Prevention+*, serta mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mengkampanyekan isu HKSR dalam program *Dance4life* maupun SGBV dalam peringatan hari-hari penting seperti Hari Perempuan Sedunia.

Selain itu, Rutgers WPF dalam implementasi programnya memiliki tujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan dengan melibatkan laki-laki untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Seperti dalam program *MenCare+* yang melibatkan laki-laki sebagai aktor perubahan. Selama ini perempuan selalu ditempatkan di dalam rumah untuk mengurus anak hingga tidak diperbolehkan bekerja. Perempuan dianggap lemah dan selalu mengedepankan perasaan. Sehingga sering kali dinomorduakan bahkan ditempatkan pada posisi yang rendah di dunia kerja. Maka program ini dijalankan agar laki-laki dapat mengubah pandangan kesehariannya, dari diskriminatif terhadap perempuan hingga lebih menghargai relasi, bersikap adil, dan mendukung kesetaraan.

2. Teori Advokasi

Advokasi merupakan upaya untuk merubah bahkan memperbaiki kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan seseorang atau kelompok yang menginginkan dan menekankan terjadinya perubahan tersebut.

Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (*to defend*), ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (*to promote*), berusaha ‘menciptakan’ yang baru (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Sehingga, tujuan dari advokasi yaitu adanya perubahan terhadap kebijakan publik.¹⁵

Kegiatan advokasi harus menempuh beberapa proses diantaranya yaitu :

1. Proses legislasi dan yuridiksi yang meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (*legal drafting*) sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Mulai dari pengajuan gagasan usul terkait perlunya undang-undang baru, perdebatan di parlemen tentang sebuah gagasan,

¹⁵ Nur Azizah, “*Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*”, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2013), hlm 11.

- pembentukan kelompok kerja dalam parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah akademik kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui dalam pemungutan suara di parlemen.
2. Proses politik dan birokrasi yang diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat didalamnya, seperti *lobbying*, negosiasi, tawar-menawar, dan kolaborasi.
 3. Proses sosialisasi dan mobilisasi yang meliputi semua bentuk kegiatan dan pembentukan pendapat umum serta tekanan masa (*political pressure*) yang terorganisir, seperti kampanye, penggalangan dukungan, diskusi, seminar, pelatihan, hingga ke pengarahan massa seperti unjuk rasa, mogok, baikot, dan blokade.¹⁶

Kegiatan advokasi yang dilakukan ditingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak seperti komunitas atau organisasi. Didalam advokasi banyak pihak (kelompok-kelompok aksi) yang terlibat. Seperti pihak yang bertindak sebagai pencetus atau mempelopori advokasi, selain itu ada pihak yang melakukan mobilisasi massa, pihak sebagai penyedia data, pihak sebagai penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legislasi maupun pihak sebagai juru bicara dan *lobbying* yang akan membentuk sebuah *networking* dari gerakan advokasi.

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink menulis buku yang sangat berpengaruh yaitu *Activists Beyond Borders: Advocacy Network in International*

¹⁶ *Ibid*, hlm 14.

Politics untuk menjelaskan sifat dan perilaku TANs. E. Keck dan Sikkink mengelompokkan strategi advokasi ini dalam *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

- a. Strategi *information politics* merupakan strategi yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menyediakan data bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui berbagai pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian. Rutgers WPF dalam hal ini melakukan pendataan dari berbagai sumber dan mengadakan penelitian muda untuk memperoleh bukti yang sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan.
- b. Strategi *symbolic politics* dilakukan dengan mengadakan ceremony, peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan isu yang diperjuangkan sehingga masyarakat memperhatikan isu tersebut. Rutgers WPF dalam strategi menjalankan perannya selalu melibatkan sebuah aksi sebagai bentuk dukungan dalam memperingati hari-hari penting seperti Hari Perempuan Sedunia, Hari AIDS Sedunia, dan peringatan lainnya yang berkaitan dengan fokus NGO ini.
- c. Strategi *leverage politics* ialah strategi untuk memperkuat dan memperluas jaringannya serta melibatkan dukungan dengan cara menggandeng organisasi internasional maupun mitra lokal yang memiliki *power* lebih besar dan aktor yang lebih kuat. Rutgers WPF dalam implementasi program tidak berjalan secara individu, melainkan selalu menggandeng mitra dan jaringan kerja, seperti Yayasan Pulih, Rifka Anisa, Rahima, Damar, PKBI, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, hingga UNFPA. Selain itu, untuk memperkuat daya dan dukungan kepada pemerintah, Rutgers WPF

- juga berpartisipasi aktif bersama mitra dalam mendukung kinerja dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan dan perhatian terhadap persoalan terkait HKSR dan SGBV.
- d. Strategi *accountability politics* adalah sebuah strategi yang dilakukan dengan mengingatkan kepada pemerintah agar dapat dengan bijak mempertanggungjawabkan sebuah kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Rutgers WPF sebagai gerakan sosial juga melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi (monev) atas dukungan yang telah diberikan pemerintah terhadap program yang berjalan. Monev yang dilakukan seperti monitoring pengajaran modul SETARA ke sekolah yang telah diberikan modul tentang seksualitas untuk siswa SMP.

D. Hipotesa

Rutgers World Population Foundation (WPF) menangani *Sexual and Gender based Violence* (SGBV) terhadap perempuan di Indonesia melalui :

1. Implementasi program yang mengarah pada aliran feminisme liberal dan sosialis. Seperti program pemberian pendidikan seksualitas yang komprehensif maupun diskusi komunitas dan dijalkannya program yang melibatkan kelompok pria ;
2. Kegiatan advokasi dengan menggunakan strategi *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics.*

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui awal terjadinya SGBV pada perempuan di Indonesia

2. Untuk mengetahui bentuk nyata Rutgers WPF dalam menangani *Sexual and Gender based Violence* (SGBV) terhadap perempuan di Indonesia

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam karya tulis ini meliputi peran Rutgers WPF dalam menangani SGBV terhadap perempuan di Indonesia. Penulis membatasi rentang waktu penelitian dimana sejak tahun 2012-2015 angka kasus SGBV mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Dalam hal ini, hingga sekarang Rutgers WPF terus berjuang dalam menjalankan perannya. Penelitian ini mencakup kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya yang sekiranya masih relevan dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dimana menjelaskan suatu masalah dan proses dengan mencari fakta-fakta yang ada untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat terhadap masalah yang diteliti

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai oleh penulis yaitu diperoleh dari buku, jurnal, dan website resmi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu menggunakan sumber kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada data-data pustaka dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik.

4. Analisis data

Analisis data merupakan data yang didapatkan dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penulisan, sistematika penulisan dalam tulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut.

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi penjelasan lebih lanjut dari bab sebelumnya. Bab ini membahas tentang sejarah awal terjadinya organisasi internasional Rutgers WPF dengan memaparkan latar belakang pembentukan, tugas, fungsi dan tujuan, serta struktural di dalamnya.

BAB III membahas secara singkat mengenai akar dan dampak dari kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Kemudian dalam bab ini akan dibahas mengenai kebijakan-kebijakan di Indonesia terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan serta situasi kasus SGBV di Indonesia.

BAB IV memaparkan tentang strategi Rutgers terhadap perempuan dalam kasus SGBV di Indonesia dan pembuktian hipotesis melalui landasan teori dengan data-data yang telah dikumpulkan.

BAB V berisi tentang penutup dan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dimana berisi tentang ringkasan mengenai penelitian yang ditulis oleh penulis dalam keseluruhan bab dengan memperhatikan hipotesis dan kerangka teori yang sudah ada.